INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Muhammad Imam Nashshar*
Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta
matesambang@gmail.com

Budi Mulyana
Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta
budimulyana@pknstan.ac.id

*Alamat Korespondensi: *matesambang@gmail.com*

ABSTRACT
This research aims to understand the effect of the Special Allocation Fund (DAK) on the Human Development Index (IPM) with the government capital expenditure as a intervening variable. The sample in this research includes 497 districts/cities in Indonesia during the period 2015 to 2019. The research method used in this research is the panel data regression with a random effect model (FEM) and path analysis. The results showed that: (1) DAK has a significant positive effect on government capital expenditure; (2) government capital expenditure has a significant positive effect on IPM; (3) DAK has a significant negative effect on IPM; and (4) DAK has a significant positive indirect effect on IPM through government capital expenditure.

Keywords: government capital expenditure, human development index, special allocation fund

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal.

Kata kunci: belanja modal, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia

KLASIFIKASI JEL:
H75

CARA MENGUTIP
Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255-270.

Indonesian Treasury Review
Vol.7, No.3, (2022), Hal 255-270

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan suatu proses yang dimaksudkan agar manusia mampu memiliki pilihan yang luas, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan untuk memenuhi standar hidup yang layak (BPS, 2020). Pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan berupa layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan memperoleh pendapatan untuk hidup layak. Selain itu, pembangunan manusia yang berhasil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Appiah *et al.*, 2019).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan manusia, diperlukan suatu instrumen pengukuran. Instrumen tersebut dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penghitungan IPM melibatkan tiga unsur utama dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat menerangkan keadaan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan berupa akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan untuk hidup layak pada suatu wilayah atau negara. Pada tahun 1990, IPM untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (1990) dan dilaporkan setiap tahunnya.

Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2019 yang dikeluarkan oleh UNDP, Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara-negara di dunia dengan angka indeks IPM sebesar 0,718 yang berarti Indonesia termasuk negara dengan pembangunan manusia kategori tinggi. Sedangkan, informasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencatat IPM Indonesia berada di angka 71,92. Angka tersebut memiliki arti bahwa pembangunan manusia Indonesia termasuk kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dengan berbagai upaya-upaya pembangunan manusia telah berhasil

Grafik 1. Perbandingan Target dan Pencapaian IPM 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

1. DAK memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal. Dengan demikian, DAK mampu meningkatkan IPM apabila dialokasikan dalam bentuk belanja modal yang berkualitas.
2. Dalam rangka peningkatan IPM, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola DAK yang diterima dalam bentuk belanja modal pengadaan infrastruktur pelayanan publik yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mempercepat penyerapan DAK serta melakukan pemantauan pelaksanaan DAK secara berkala. Selain itu, Kementerian Keuangan dapat menetapkan kebijakan prosedur penyaluran DAK yang paling efektif dan efisien agar penyaluran DAK dapat berjalan dengan optimal.

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Namun, pencapaian IPM tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Selama lima tahun terakhir, terjadi inkonsistensi pencapaian IPM nasional apabila dibandingkan dengan target dalam Undang-Undang APBN sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 1. Di tahun 2015 sampai dengan 2017 Indonesia berhasil mencapai target IPM yang telah ditetapkan tetapi tidak berhasil mencapai target di tahun 2018 dan 2019.

Selain itu, kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia adalah tidak meratanya pembangunan antardaerah di Indonesia. Pembangunan di Indonesia masih bersifat Jawa-sentris. Rata-rata IPM di Pulau Jawa lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 2. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan telah berhasil tetapi masih ada kalangan masyarakat yang belum dapat menikmati hasil dari pembangunan khususnya daerah di luar Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur.

Untuk mengantisipasi kondisi pembangunan yang tidak merata serta inkonsistensi pencapaian target pembangunan manusia, pemerintah melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan daerah serta agar dampak pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan lebih merata serta berkeadilan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001 dengan

Grafik 2. IPM Per Wilayah di Indonesia
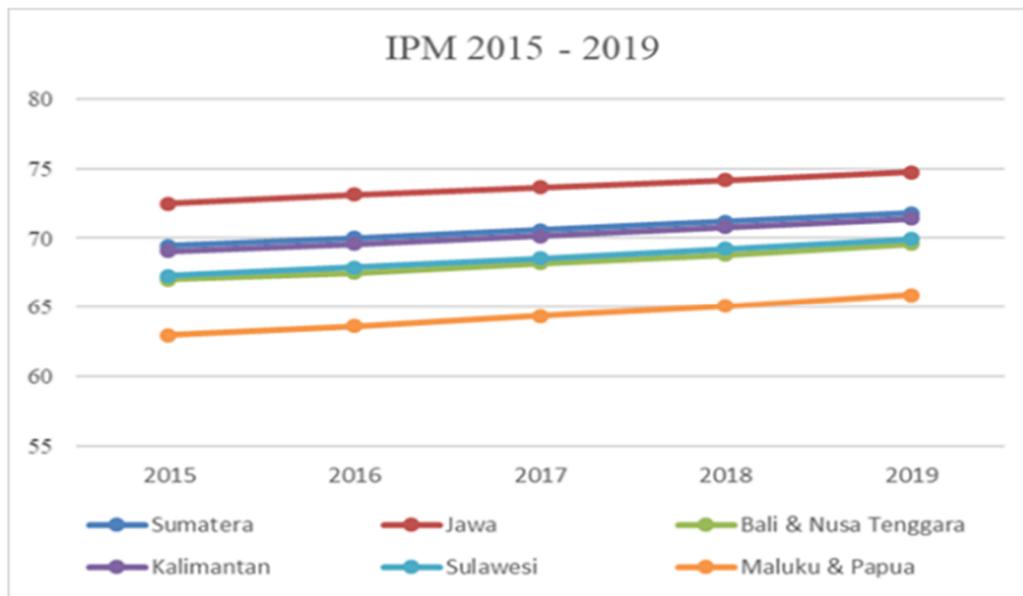
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dan memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dengan intervensi pemerintah pusat yang semakin berkurang. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada pemerintah pusat akan karakteristik dan potensi daerahnya sehingga pengambilan keputusan pembangunan di daerah dapat dilakukan lebih tepat dan akurat. Walaupun peran pemerintah pusat menjadi lebih terbatas dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi, tujuan yang ingin dicapai baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kesenjangan pendapatan antardaerah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tidak semua daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu mendanai seluruh kebutuhan fiskalnya mengingat potensi sumber daya tiap-tiap daerah berbeda satu sama lain. Karena hal tersebut, pemerintah pusat melaksanakan transfer ke daerah yang biasa disebut dengan dana perimbangan. Dana tersebut dialokasikan untuk keperluan pendanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna mencegah ketimpangan fiskal antardaerah, mencegah ketimpangan antara pusat dengan daerah, dan membantu daerah untuk mendanai pembangunannya (Republik Indonesia, 2004b).

Salah satu bagian dana transfer ke daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana transfer yang bersifat *specific grants*, yaitu penggunaannya dikhususkan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas nasional di daerah (Republik Indonesia, 2004b). Dengan penggunaan yang telah ditetapkan, diharapkan DAK dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan manusia, khususnya pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan sektor yang dapat didanai melalui DAK.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam tata kelola DAK di daerah. Yaqin dan Titiek (2018) menyatakan bahwa pengelolaan DAK belum berorientasi ke anggaran berbasis kinerja sehingga belum efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2011) menemukan permasalahan-permasalahan dalam tata kelola DAK, antara lain:

1. Kebijakan penyaluran DAK telah melenceng dari sifat khususnya dan lebih mengarah kepada sifat pemerataan;
2. Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengalokasian DAK masih bersifat *top-down*;
3. Pengelolaan DAK masih menitikberatkan pada *input*, bukan terhadap *output* atau *outcome* yang ingin dicapai;
4. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tahunan sering terlambat, sering berubah, dan kurang memperhatikan kebutuhan daerah;
5. Belum tersedianya pedoman pengelolaan dan pemantauan DAK; dan

6. Pemanfaatan DAK oleh daerah belum optimal dan belum dapat mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan terhadap tata kelola DAK. Upaya perbaikan tata kelola DAK yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain, perubahan penyusunan kebijakan DAK menjadi berbasis *output*, penataan kembali bidang-bidang DAK agar dapat menajamkan fokus terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan publik, perubahan mekanisme pengalokasian DAK yang dilakukan dengan secara *bottom-up* melalui mekanisme *proposal based* (usulan daerah), pemberian kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan DAK Fisik paling banyak sebesar 5 persen dari pagu dalam rangka mendanai kegiatan penunjang nonfisik, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan antartingkat pemerintah dan antardaerah (Republik Indonesia, 20014b, 2015, 2016, 2017, 2018).

Alokasi dana transfer ke daerah tidak akan bermanfaat terhadap masyarakat apabila tidak direalisasikan dalam bentuk belanja daerah yang berkualitas. Menurut Juanda *et al*. (2013) dalam Wahyuni *et al*. (2017), belanja yang berkualitas merupakan alokasi belanja yang efektif dan efisien, tepat waktu, akuntabel, dan transparan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang terkait langsung dengan penyediaan layanan publik kepada masyarakat adalah belanja modal. Belanja modal tersebut memiliki peranan yang vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah serta penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari berbagai daerah, sebagian besar penggunaan PAD dan dana transfer yang bersifat *block grants* masih berfokus pada keperluan belanja pegawai dan belanja operasional rutin, sehingga daerah sangat bergantung kepada DAK untuk keperluan belanja modal (Bappenas, 2011).

Rata-rata nasional rasio belanja modal pemerintah daerah adalah 22,48% selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Rasio tersebut masih terbilang rendah dan di bawah target pemerintah, yang mana seharusnya rasio belanja modal pemerintah daerah adalah 30% dari total belanja daerah dalam APBD sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015. Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya agar kualitas belanja negara dapat meningkat guna memenuhi target 30% tersebut. Peningkatan kualitas belanja negara dilakukan dengan cara menggeser anggaran belanja yang bersifat konsumtif menjadi anggaran belanja yang bersifat produktif.

Rasio belanja modal yang di bawah target, tidak meratanya pembangunan di Indonesia, serta inkonsistensi pencapaian IPM menandakan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dalam bentuk pemberian DAK kepada daerah dan realisasi belanja modal oleh daerah belum sepenuhnya dapat memberikan dampak yang optimal kepada pembangunan manusia. Beberapa penelitian terkait pengaruh DAK melalui belanja modal terhadap pembangunan manusia sudah banyak diteliti dengan hasil penelitian yang bermacam-macam. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut, antara lain, berpengaruh signifikan positif (Riviando *et al*., 2019), tidak berpengaruh (Siswadi *et al*., 2015), dan berpengaruh signifikan negatif (Purba, 2016). Seharusnya, hasil yang diharapkan adalah DAK dapat berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM melalui belanja modal, sehingga menandakan kebijakan tata kelola DAK dan upaya peningkatan kualitas belanja modal yang ditempuh oleh pemerintah saat ini sudah tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas pengaruh DAK melalui belanja modal terhadap IPM, sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan dalam satu wilayah atau provinsi tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang memperluas cakupan wilayah yang diteliti agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dibutuhkan penelitian terkait pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh DAK terhadap belanja modal, (2) pengaruh belanja modal terhadap IPM, (3) pengaruh DAK terhadap IPM, dan (4) pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM melalui belanja modal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan pemikiran bagi Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penyaluran DAK.

STUDI LITERATUR

Teori merupakan rangkuman-rangkuman tentang kaidah-kaidah hukum dalam suatu bidang tertentu yang diperoleh berdasarkan pengamatan (Sugiyono, 2015). Adapun landasan teori yang menjadi patokan dalam melaksanakan penelitian ini, dijelaskan di bawah ini.

Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Oates (1999), kebijakan desentralisasi dilaksanakan untuk tujuan efisiensi sumber daya guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tingkat *output* yang efisien dari barang publik lokal kemungkinan bervariasi di setiap daerah sebagai akibat dari perbedaan preferensi masyarakat dan perbedaan biaya penyediaan barang publik. Dalam teori desentralisasi yang dinyatakan oleh Oates (2006), jika biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama besar, maka akan lebih efisien dan efektif jika pemerintah daerah yang menyediakan barang dan jasa publik tersebut. Kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki preferensi barang dan jasa publik yang cenderung homogen (Wallis dan Oates, 1988).

Terdapat tiga alasan yang melandasi suatu negara untuk menerapkan kebijakan desentralisasi (Wicaksono, 2012). Pertama, untuk membentuk unit pemerintahan yang lebih kecil sebab sejumlah negara menganggap rezim pemerintah yang sentralistis adalah rezim yang diktator. Kedua, untuk mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang terlalu luas yang pada akhirnya menyebabkan menumpuknya pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan pada institusi pemerintah pusat. Ketiga, untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di daerah. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta memudahkan proses pengawasan terhadap kegiatan pemerintah.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu sistem yang komprehensif. Bahl (1999) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan sukses jika memenuhi kondisi di mana dewan dan kepala daerah dipilih secara langsung. Jika kepala daerah diangkat oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, akuntabilitas mereka akan ke atas dan bukan ke bawah kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan efisiensi yang menjadi tujuan inti dari desentralisasi fiskal tidak dapat tercapai. Kondisi lain yang diperlukan agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan sukses adalah adanya serangkaian tanggung jawab pengeluaran dan kewenangan memungut pajak, otonomi penyusunan anggaran, transparansi, dan pembatasan anggaran yang ketat (Bahl, 1999). Pemerintah daerah dipaksa untuk hidup sesuai kemampuan mereka dan bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dengan adanya pembatasan anggaran yang ketat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan desentralisasi sebagai pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan perkara-perkara pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing antardaerah. Implikasi langsung dari adanya kebijakan desentralisasi ialah besarnya dana yang dibutuhkan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah juga melaksanakan desentralisasi fiskal untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi fiskal dilaksanakan berdasarkan prinsip *finance follow function*, yaitu penyerahan kewenangan dan tugas kepada pemerintah daerah lalu diikuti dengan pemberian pendanaannya (Bahl, 1999). Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi dan pajak serta memberikan bantuan keuangan berupa transfer ke daerah atau dikenal sebagai dana perimbangan.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis dana perimbangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah tertentu dan berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat khusus serta merupakan prioritas nasional (Republik Indonesia, 2004a). DAK secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

DAK Fisik disalurkan untuk pendanaan kegiatan fisik yang bersifat khusus dan merupakan prioritas nasional (Republik Indonesia, 2019). Alokasi DAK Fisik bertujuan untuk menjaga ketercapaian *output* maupun *outcome* yang berupa penyediaan fasilitas pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Sedangkan, DAK Nonfisik merupakan DAK yang disalurkan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimum dengan harga yang terjangkau (Republik Indonesia, 2019)

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan aset tetap maupun aset lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, memiliki masa manfaat di atas dua belas bulan, serta memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Belanja modal termasuk dalam kelompok

belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Belanja modal dapat dibagi menjadi dua bagian belanja, antara lain yaitu belanja publik dan belanja aparatur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Kementerian Dalam Negeri, 2002). Belanja modal termasuk belanja pemerintah yang dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya, seperti meningkatkan pelayanan dasar baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh lapisan masyarakat (Republik Indonesia, 2004a).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia di wilayah tertentu yang dinyatakan dalam angka indeks. IPM dihitung berdasarkan pada komponen-komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar dalam perhitungan IPM tersebut, antara lain usia yang panjang dan kehidupan yang sehat, ilmu pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak.

Tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam menyejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari status capaian IPM pada wilayah tersebut. Perubahan status pembangunan manusia dapat dijadikan dasar untuk menilai perkembangan pembangunan manusia di daerah tertentu. Badan Pusat Statistik membagi status pembangunan manusia menjadi empat klasifikasi, yaitu sangat tinggi (nilai IPM di atas 80), tinggi (angka IPM di antara 70 dan 80), sedang (angka IPM di antara 60 dan 70), dan rendah (nilai IPM di bawah 60).

Pengukuran IPM pertama kali dipublikasikan pada tahun 1990 oleh UNDP. Sejak saat itu, UNDP menerbitkan laporan tahunan yang dikenal dengan nama *Human Development Report* (HDR) yang memuat laporan tentang IPM semua negara-negara di dunia.

Penelitian Terdahulu

Hasil riset-riset terdahulu dapat dijadikan bahan pembanding dan referensi guna memberikan gambaran terhadap hasil penelitian. Penelitian mengenai pengaruh DAK dan belanja modal terhadap IPM sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti di masa lalu, antara lain:

1. Penelitian tentang pengaruh DAK terhadap belanja modal oleh Ardhani (2011) dan Wandira (2013). Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil berbeda, di mana penelitian Ardhani (2011) memperoleh simpulan bahwa tidak ada pengaruh DAK terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian Wandira (2013) memperoleh simpulan bahwa DAK memiliki signifikansi positif terhadap belanja modal.
2. Penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap IPM oleh Mirza (2012) serta Pramartha dan Dwirandra (2018). Penelitian Mirza (2012) menghasilkan simpulan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sedangkan, penelitian Pramartha dan Dwirandra (2018) menyatakan tidak ada pengaruh belanja modal terhadap IPM.
3. Penelitian tentang pengaruh DAK terhadap IPM oleh Suhyanto *et al*. (2020) memperoleh simpulan bahwa semua dana transfer termasuk DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sedangkan, penelitian Sembiring (2020) menghasilkan simpulan bahwa DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap IPM.
4. Penelitian tentang pengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja modal oleh Riviando *et al*. (2019), Siswadi *et al*. (2015), Purba (2016). Ketiga penelitian tersebut menghasilkan simpulan yang berbeda. Penelitian Riviando *et al*. (2019) memperoleh hasil bahwa DAK terhadap IPM melalui belanja modal berpengaruh signifikan positif. Penelitian Siswadi *et al*. (2015) memperoleh simpulan tidak ada pengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja modal sedangkan penelitian Purba (2016) menyatakan bahwa DAK terhadap IPM melalui belanja modal berpengaruh negatif.

Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 3. DAK adalah salah satu sumber dana dalam rangka penyediaan infrastruktur dan fasilitas layanan publik di daerah. Oleh karena itu, apabila DAK yang disalurkan kepada daerah bertambah, maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga akan meningkat. Peningkatan alokasi anggaran belanja modal membuat daerah dapat menyediakan infrastruktur layanan publik berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas publik lainnya kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian ini. Variabel memiliki fungsi untuk meningkatkan akurasi dari penelitian sebab variabel tersebut dijaga agar konstan. Dengan konstannya variabel kontrol, faktor-faktor lain di luar penelitian tidak akan memengaruhi variabel terikat selain variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel kontrol berfungsi untuk meningkatkan akurasi dari penelitian serta mempermudah

Indonesian Treasury Review
Vol.7, No.3, (2022), Hal 255-270

penjelasan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel kontrol yang dipakai, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,

Perumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian ini berdasarkan teori yang ada, penelitian sebelumnya, serta kerangka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

DAK adalah dana transfer yang bersifat *specific grant*, yaitu pemakaiannya dikhususkan untuk mendanai pekerjaan daerah yang merupakan prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur di daerah merupakan program prioritas pemerintah sejak tahun 2015. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui belanja modal dengan sumber dana salah satunya adalah DAK. DAK, khususnya DAK Fisik bertujuan untuk penyediaan infrastruktur fasilitas umum, yang mana penyediaan infrastruktur tersebut merupakan belanja modal pemerintah. Hal tersebut diperkuat melalui penelitian Wandira (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh positif yang signifikan DAK terhadap belanja modal, sehingga hipotesis pertama adalah:

H_1: DAK memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Salah satu tujuan belanja modal adalah untuk perolehan aset tetap berupa infrastruktur pelayanan publik. Belanja modal termasuk belanja pemerintah yang dialokasikan dengan tujuan untuk menjadikan kualitas hidup masyarakat Indonesia lebih baik dibanding sebelumnya melalui upaya-upaya untuk memperbaiki pelayanan dasar baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian Mirza (2012) yang menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan belanja modal terhadap IPM, sehingga hipotesis kedua adalah:

H_2: Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap IPM.

3. Pengaruh DAK terhadap IPM

Penelitian Suhyanto *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. DAK berperan sebagai sumber dana untuk penyediaan infrastruktur publik dan fasilitas layanan dasar kepada masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Bidang-bidang yang merupakan komponen

Gambar 3. Kerangka Penelitian
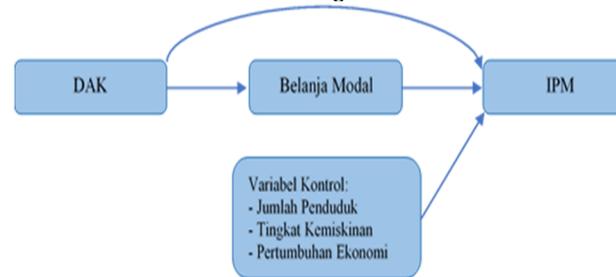
Sumber: Diolah penulis

perhitungan IPM, seperti bidang pendidikan dan bidang kesehatan merupakan bidang-bidang yang pembangunannya didanai menggunakan DAK. Oleh sebab itu, hipotesis yang ketiga adalah:

H_3: DAK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM.

4. Pengaruh Tidak Langsung DAK terhadap IPM melalui Belanja Modal

DAK, khususnya DAK Fisik berperan penting sebagai sumber dana dalam melaksanakan belanja modal pemerintah. Di sisi lain, belanja modal termasuk belanja pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan aset tetap berupa infrastruktur layanan pulik. Infrastruktur tersebut lalu digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut serta perumusan hipotesis pertama, kedua, dan ketiga, variabel belanja modal dapat menjembatani pengaruh DAK terhadap IPM yang memberikan pengaruh secara tidak langsung. Hal tersebut didukung dengan bukti hasil penelitian Riviando *et al.* (2019) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan positif DAK terhadap IPM melalui belanja modal, sehingga hipotesis keempat adalah:

H_4: DAK memiliki pengaruh tidak langsung signifikan dan positif terhadap IPM melalui belanja modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan, sampelnya diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria memiliki kelengkapan data selama lima tahun (2015-2019) yang meliputi realisasi DAK, realisasi belanja modal, angka IPM, serta data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Jenis dan Sumber Data

Tabel 1. Statistik Deskrptif

Variabel	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks	Sumber Data
Var. Terikat					
IPM	68,11	6,67	25,47	86,65	BPS
Var. Bebas					
DAK (miliar rupiah)	192,86	107,14	0,54	744,50	DJPK
Belanja Modal (miliar rupiah)	322,04	215,21	45,53	2.754,30	DJPK
Var. Kontrol					
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	493,96	608,66	13,62	5.965,41	BPS
Tingkat Kemiskinan (%)	12,89	8,05	1,67	45,74	BPS
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	4,01	-38,52	112,20	BPS
Jumlah Observasi	**2.485**				

Sumber: data diolah penulis

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup kabupaten/kota seluruh Indonesia pada periode tahun 2015-2019. Sumber data penelitian diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Statistik deskriptif data-data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Total data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 2.485. Sebagaimana tercantum dalam tabel, nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota tahun 2015-2019 adalah 68,11 dengan nilai terendah pada angka 25,47 dan nilai tertinggi 86,65. Untuk data DAK, nilai rata-ratanya adalah Rp192,86 miliar dengan nilai terendah Rp0,54 miliar dan nilai tertinggi Rp744,50 miliar. Belanja Modal memiliki nilai rata-rata Rp322,04 miliar dengan nilai terendah Rp45,53 miliar dan nilai tertinggi Rp2.754,30 miliar. Untuk data Jumlah Penduduk, nilai rata-ratanya adalah 493,96 ribu jiwa dengan jumlah terendah sebanyak 13,62 ribu jiwa dan jumlah tertingginya 5.965,41 ribu. Selanjutnya adalah data Tingkat Kemiskinan dengan nilai rata-rata 12,89% dari nilai terendah 1,67% dan nilai tertinggi yang mencapai 45,74%. Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai rata-rata 5,47%, dimana nilai terendahnya adalah -38,52% dan nilai tertinggi 112,20%.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat ialah angka IPM dari setiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015-2019 yang dipublikasikan oleh BPS. IPM dihitung berdasarkan satuan poin dan skala ukur rasio.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel bebas ialah realisasi DAK yang diterima oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2015-2019. Perhitungan DAK dinyatakan dalam satuan rupiah dan skala ukur rasio. Data DAK kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma.
3. Belanja modal sebagai variabel bebas adalah belanja modal yang direalisasikan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2015-2019. Perhitungannya menggunakan satuan Rupiah dan skala ukur rasio. Data belanja modal kemudian ditransformasi dalam bentuk logaritma.
4. Jumlah penduduk sebagai variabel kontrol adalah hasil proyeksi perhitungan jumlah penduduk oleh BPS dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2015-2019 yang dinyatakan dalam satuan jiwa dan skala ukur rasio. Data jumlah penduduk kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma. Penggunaan variabel ini berdasarkan pada asumsi semakin banyak populasi manusia akan mengurangi kualitas pembangunan manusia (Arisman, 2018).
5. Tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol adalah perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk secara total di suatu daerah. Dalam penelitian ini, data tingkat kemiskinan menggunakan data kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015-2019 yang dipublikasikan BPS dan dinyatakan dalam satuan persen dengan skala rasio. Penggunaan variabel ini berdasarkan pada asumsi bahwa jumlah penduduk miskin yang besar akan menghambat pembangunan manusia (Mirza, 2012).
6. Pertumbuhan ekonomi adalah angka persentase dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan dasar pengukuran peningkatan atau penurunan perekonomian suatu daerah selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diproksi menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam

satuan persen dengan skala ukur rasio. Penggunaan variabel ini berdasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong pembangunan manusia (Maulana dan Bowo, 2013).

Model Penelitian

Model penelitian ini disajikan dalam persamaan 1-3 di bawah ini:

$$LOGBM_{i,t} = \alpha + \beta_1 LOGDAK_{i,t} + \varepsilon \quad (1)$$

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_2 LOGDAK_{i,t} + \beta_3 LOGJP_{i,t} + \beta_4 TK_{i,t} + \beta_5 PE_{i,t} + \varepsilon \quad (2)$$

$$IPMi,t = \alpha + \beta_6 LOGDAK_{i,t} + \beta_7 LOGBM_{i,t} + \beta_8 LOGJP_{i,t} + \beta_9 TK_{i,t} + \beta_{10} PE_{i,t} + \varepsilon \quad (3)$$

Keterangan:
i : sampel kabupaten/kota
t : sampel tahun
α : konstanta
β_{1-10} : koefisien regresi
LOGBM : belanja modal (transformasi *log*)
LOGDAK : dana alokasi khusus (transformasi *log*)
IPM : indeks pembangunan manusia
LOGJP : jumlah penduduk (transformasi *log*)
TK : tingkat kemiskinan
PE : pertumbuhan ekonomi
ε : *error term*

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model regresi terbaik untuk analisis regresi data panel dilakukan melalui berbagai uji formal yang, antara lain, meliputi Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (Uji B-P LM). Pemilihan antara model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan, dilakukan melalui pengujian *Chow.* Pemilihan antara model FEM atau *Random Effect Model* (REM) yang akan digunakan, dilakukan melalui pengujian *Hausman.* Sedangkan, pemilihan antara model CEM atau REM yang akan digunakan, dilakukan melalui pengujian B-P LM.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan agar menjamin serta memastikan variabel-variabel bebas tidak memiliki sifat bias dan memiliki varian yang minimum. Adapun pengujian asumsi klasik tersebut terdiri dari berbagai pengujian, yakni uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

Uji Hipotesis

Hipotesis diuji melalui cara-cara berikut, yakni analisis koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), uji signifikansi parsial (uji t), dan analisis jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Sampel

Teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria dilakukan untuk pemilihan sampel penelitian. Kriteria penentuan sampel yang ditentukan, yakni kabupaten/kota yang memiliki kelengkapan data selama lima tahun (2015-2019) yang meliputi nilai IPM, realisasi penerimaan DAK, realisasi belanja modal, serta data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel 497 kabupaten/kota.

Pemilihan regional kabupaten/kota berdasarkan pada alasan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Fauzan, 2016). Sedangkan, pemilihan periode tahun yang dianalisis 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan pada alasan di tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan penyaluran DAK dari mekanisme *formula based* menjadi *proposal based.* Perubahan mekanisme penyaluran tersebut bertujuan agar penyaluran DAK lebih sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah. Selain itu, tahun 2015 sampai dengan 2019 merupakan masa efektif periode pemerintahan yang berjalan (era Presiden Joko Widodo periode pertama), sehingga diharapkan dapat menunjukkan hasil yang berkaitan dengan kondisi sekarang ini.

Hasil Pemilihan Model Regresi

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, ketiga model persamaan regresi menggunakan FEM. Hasil uji *Chow* pada ketiga model persamaan menunjukkan nilai *probability Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 (lebih kecil daripada 0,05). Dengan demikian, model FEM yang dipilih. Selanjutnya, dilakukan uji *Hausman* terhadap ketiga model tersebut. Hasil yang diperoleh adalah nilai *probability Cross-section random* sebesar 0,0000 (lebih kecil daripada 0,05), sehingga dipilih model FEM. Uji BP-LM tidak perlu dilakukan karena hasil dari dua pengujian sebelumnya adalah FEM.

Namun, penggunaan model FEM memberikan hasil yang tidak optimal, sehingga digunakan model REM. Menurut Gujarati (2004), penggunaan REM akan lebih efisien jika jumlah data *cross-section* (N) sangat besar dan data *time series* (t) sangat kecil. Penelitian ini memiliki data *cross-section* 497 serta data *time series* sebanyak lima. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dipilih model REM.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur

Keterangan Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
DAK terhadap IPM	-0,22460	0,03883	-0,18577
DAK terhadap BM	0,42898		0,42898
BM terhadap IPM	0,09051		0,09051

Sumber: data diolah penulis

Hasil pengujian asumsi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian multikolinearitas dilakukan melalui matriks korelasi antarvariabel dan memperoleh hasil tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas (korelasi antarvariabel bebas di bawah 0,90) pada ketiga model persamaan regresi.
2. Pengujian heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan dalam model REM karena dalam model ini data yang memiliki varians tinggi dibagi dengan varian yang tinggi. Sedangkan, data dengan varians rendah dibagi dengan varians yang rendah juga. Hal ini membuat regresi data panel dengan model REM dapat diasumsikan bebas dari heteroskedastisitas.
3. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara *Serial Correlation LM Test* dan memperoleh hasil bahwa terdapat autokorelasi pada ketiga persamaan regresi, sehingga dilakukan perbaikan dengan metode *Durbin's two-step method*.
4. Pengujian normalitas dijalankan melalui uji *Jarque-Bera* (JB) dan memperoleh hasil bahwa residual pada ketiga persamaan regresi tidak terdistribusi normal. Atas masalah tersebut tidak dilakukan perbaikan karena residual data dalam penelitian ini dapat dianggap terdistribusi normal berdasarkan *central limit theorem*.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan analisis regresi menggunakan model REM. Hasil analisis regresi model persamaan 1, 2, dan 3 disajikan pada Tabel 2, 3, dan 4.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Persamaan 1

Variable	***Coefficient***	***t-Statistic***	***Prob,***
C	11,05887	32,84367	0,0000
LOGDAK	0,428980	24,19857	0,0000
Weighted statistic			
R-squared	0,223076	*Mean dependent var*	8,493934
Adjusted Rsquared	0,222685	*S,D, dependent var*	0,257780
F-statistic	570,2340	*Sum squared resid*	102,5826
Prob (F-statistic)	0,000000	*Durbin-Watson stat*	1,916495

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 2, *adjusted* R^2 model persamaan 1 adalah 0,222685. Artinya, DAK dapat menjelaskan variasi BM sebesar 22,27%. Sedangkan, sebesar 77,73% variasi variabel terikat (BM) dijelaskan oleh variabel-variabel selain yang terdapat di dalam model. Nilai *probability* dalam uji F sebesar 0,000000 (di bawah 0,05). Nilai tersebut berarti semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM. Uji t pada setiap variabel bebas (DAK) menunjukkan nilai *probability* 0,0000 (di bawah 0,05). Nilai tersebut berarti DAK berpengaruh signifikan terhadap BM. Berdasarkan Tabel 3, nilai *adjusted* R^2 model persamaan 2 adalah 0,340006. Artinya, variabel bebas dan variabel kontrol (DAK, JP, TK, dan PE) dapat menjelaskan variasi IPM sebesar 34,00%. Sedangkan, sebesar 66,00% variasi variabel IPM dijelaskan oleh variabel-variabel selain yang terdapat dalam model. Nilai *probability* dalam uji F sebesar 0,000000 (di bawah 0,05). Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Uji t pada variabel bebas DAK serta variabel kontrol JP dan PE menunjukkan nilai *probability* yang berada di bawah 0,05 yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, variabel kontrol TK berpengaruh tidak signifikan

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Persamaan III

Variable	*Coefficient*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	10,13585	32,07857	0,0000
BM	0,000104	2,478105	0,0134
DAK	0,000396	5,806101	0,0000
JP	0,004874	5,376324	0,0000
TK	-0,120900	-27,33012	0,0000
PE	-0,002155	-2,186990	0,0290
IPM(-1)	0,652386	60,28286	0,0000
Weighted statistic			
R-squared	0,999452	*Mean dependent var*	49,60563
Adjusted R-squared	0,999173	*S.D. dependent var*	50,13722
F-statistic	3.588,962	*Sum squared resid*	45,23831
Prob(F-statistic)	0,000000	*Durbin-Watson stat*	3,059286

Sumber: Output *Eviews* (data diolah)

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Persamaan 3

Variable	***Coefficient***	***t-Statistic***	***Prob.***
C	15,62327	15,57976	0,0000
LOGBM	0,090513	3,891275	0,0001
LOGDAK	-0,224604	-14,69487	0,0000
LOGJP	2,929957	14,98107	0,0000
TK	-0,002453	-1,541852	0,1233
PE	-0,320277	-30,15784	0,0000
Weighted statistic			
R-squared	0,364249	*Mean dependent var*	1,810420
Adjusted R-squared	0,362645	*S.D. dependent var*	0,365925
F-statistic	227,1141	*Sum squared resid*	169,1489
Prob(F-statistic)	0,000000	*Durbin-Watson stat*	1,417041

Sumber: data diolah penulis

terhadap IPM sebab nilai *probability* variabel TK lebih besar daripada 0,05.

Pada Tabel 4, *adjusted* R^2 model persamaan 3 adalah 0,364249. Artinya, variabel bebas dan variabel kontrol (BM, DAK, JP, TK, dan PE) dapat menjelaskan variasi variabel terikat (IPM) sebesar 36,26%. Sementara itu, sisanya sebesar 63,74% variasi variabel terikat dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak ada di dalam model. Uji F menunjukkan nilai *probability* sebesar 0,000000 (di bawah 0,05) yang berarti semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Uji t pada variabel bebas BM dan DAK serta variabel kontrol JP dan PE menunjukkan nilai *probability* yang berada di bawah 0,05 yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan, variabel kontrol TK berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM karena nilai *probability* yang berada di atas 0,05. Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 4, kemudian disusun diagram jalur sebagaimana Lampiran.

Nilai *probability t-statistic* jalur DAK ke BM, BM ke IPM, dan DAK ke IPM di bawah angka 0,05. Hal ini menandakan terdapat pengaruh yang signifikan DAK terhadap BM, BM terhadap IPM, dan DAK terhadap IPM. Koefisien determinasi umum (R_m^2) pada model jalur pada Lampiran adalah 0,504574. Artinya, dalam model pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM melalui BM, variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel DAK secara tidak langsung melalui variabel BM sebesar 50,46%. Sedangkan, 49,54% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model.

Berdasarkan diagram jalur pada Lampiran, maka nilai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total setiap jalur akan dihitung dan disajikan sebagaimana dalam Tabel 5.

Kemudian, uji *Sobel* dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM melalui BM. Berdasarkan hasil uji *Sobel*, nilai t hitung adalah 3,842. Nilai ini berada di atas nilai t tabel ($_{0,05;\ inf.}$), yakni 1,960. Hal ini berarti belanja modal secara signifikan dapat memediasi pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Wandira (2013) yang memperoleh hasil serupa. Hasil tersebut menandakan bahwa belanja modal pemerintah kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh alokasi DAK yang diterimanya. Semakin besar DAK yang diterima, maka belanja modalnya juga akan semakin besar. Hasil penelitian ini semakin mempertegas tujuan penggunaan dari DAK itu sendiri, yaitu diprioritaskan untuk kegiatan fisik (Republik Indonesia, 2014). DAK, khususnya DAK Fisik yang bertujuan untuk penyediaan infrastruktur fasilitas pelayanan dasar publik di daerah, yang mana pengadaan infrastruktur tersebut dilakukan melalui belanja modal. Hasil penelitian ini juga semakin mempertegas temuan Bappenas (2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung kepada DAK untuk melaksanakan belanja modal sebab sebagian besar DAU dan DBH dipergunakan untuk keperluan belanja pegawai dan belanja rutin. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan kebijakan paling sedikit 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) harus diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur sejak tahun 2017 (Republik Indonesia, 2016). Kebijakan ini bertujuan agar daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan DTU dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap DAK. Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap DAK adalah meningkatkan kemandirian fiskal dengan menerapkan strategi peningkatan PAD. Strategi peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara pengkajian potensi PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, serta pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan PAD (Nilawati, 2019).

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM dengan adanya variabel kontrol jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Mirza (2012) yang memperoleh hasil serupa. Hasil ini semakin mempertegas tujuan dari belanja pemerintah termasuk belanja modal, yaitu diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan dasar baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh lapisan masyarakat (Republik Indonesia, 2004a). Belanja modal bertujuan untuk pengadaan aset tetap maupun aset lainnya bagi pemerintah, di mana aset tersebut digunakan untuk mendukung tugas pemerintahan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Belanja modal dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan publik dasar akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut berperan penting terhadap peningkatan pembangunan manusia.

3. Pengaruh DAK terhadap IPM

Berdasarkan Tabel 4, didapatkan hasil bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM dengan adanya variabel kontrol jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini bertentangan dengan teori tentang DAK, di mana DAK bertujuan untuk penyediaan fasilitas pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa DAK yang diterima daerah tidak akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan apabila pengelolaan DAK tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, penggunaan data DAK yang tidak dibagi per jenis bidang dapat memberikan hasil penelitian yang bias, di mana pendanaan DAK diperuntukkan untuk berbagai bidang kegiatan prioritas nasional. Sementara itu, komponen IPM hanya meliputi tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

4. Pengaruh Tidak Langsung DAK terhadap IPM melalui Belanja Modal

Berdasarkan analisis jalur, didapatkan hasil bahwa DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal dengan adanya variabel kontrol jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selaras dengan riset Riviando *et al.* (2019) yang memperoleh hasil serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa DAK yang diterima oleh daerah mampu meningkatkan IPM dengan belanja modal yang efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur fasilitas publik dengan belanja modal yang sumber pendanaannya dari DAK memang tidak serta merta meningkatkan IPM. Namun, dengan adanya fasilitas tersebut, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pencapaian standar hidup layak akan semakin mudah. Sebagai contoh, program digitalisasi sekolah yang salah satu sumber dananya adalah DAK Fisik. Dalam program tersebut, setiap sekolah akan diberikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Alokasi DAK untuk pengadaan peralatan TIK tersebut secara tidak langsung akan memudahkan guru dan siswa untuk mengakses informasi serta menguasai perkembangan teknologi dan informasi. Pada akhirnya kualitas sumber daya manusia akan meningkat dengan mudahnya akses terhadap informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari riset ini ialah untuk mengukur pengaruh DAK terhadap IPM dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan terhadap 497 kabupaten/kota di Indonesia dengan periode tahun 2015 sampai dengan 2019 menggunakan analisis regresi linear berganda *Random Effect Model* (REM).

Hasil riset ini mengungkapkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima. Hasil ini dibuktikan melalui nilai koefisien regresi DAK 0,428980 dengan *probability t-statistic* 0,0000. Hasil ini sesuai dengan tujuan penggunaan DAK, yaitu diprioritaskan untuk kegiatan fisik. Namun, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil ini dibuktikan melalui nilai koefisien regresi DAK -0,224604 dan *probability t-statistic* 0,0000. Hal ini disebabkan oleh DAK masih berupa dana potensial dalam melaksanakan pembangunan, sehingga belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien.

Di sisi lain, belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPM. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima. Hasil ini dibuktikan melalui nilai koefisien regresi belanja modal 0,090513 dan *probability t-statistic* 0,0001. Hasil ini sesuai dengan tujuan pengalokasian belanja modal, yaitu untuk membangun fasilitas pelayanan dasar publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang termasuk ke dalam komponen dari IPM.

DAK melalui belanja modal mempunyai pengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap IPM, sehingga hipotesis keempat dapat diterima. Hasil ini dibuktikan melalui analisis jalur dengan nilai pengaruh tidak langsung 0,03883 serta hasil uji *Sobel* yang memperoleh hasil signifikan. Hasil ini sesuai dengan tujuan pengalokasian DAK dan belanja modal, yaitu DAK diprioritaskan untuk kegiatan fisik berupa penyediaan fasilitas umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mana fasilitas tersebut diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan hasil dari riset ini, Kementerian Keuangan hendaknya mengevaluasi prosedur penyaluran DAK mengingat selama tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat beberapa kali perubahan dalam prosedur penyaluran DAK. Kementerian Keuangan dapat menetapkan kebijakan prosedur penyaluran DAK yang paling efektif dan efisien agar pelaksanaan DAK di daerah dapat berjalan dengan optimal.

Selain Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mempercepat penyerapan DAK yang selama ini sering mengalami keterlambatan, sehingga

pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK menjadi tidak optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemantauan pelaksanaan DAK secara berkala selama tahun anggaran berjalan.

Porsi anggaran Dana Transfer Umum (DTU) untuk keperluan belanja infrastruktur pelayanan publik dasar juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak terlalu bergantung kepada DAK. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan menerapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penyediaan fasilitas publik dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan teori desentralisasi fiskal. Penggunaan PAD dan DTU hendaknya jangan hanya fokus terhadap belanja rutin dan belanja pegawai melainkan digunakan juga untuk belanja modal berupa penyediaan infrastruktur fasilitas publik.

Dalam pelaksanaan belanja modal dan penyediaan infrastruktur fasilitas publik, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memperhatikan dari sisi kuantitas melainkan memperhatikan juga sisi kualitas belanja infrastruktur tersebut. Apakah belanja infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan apakah fasilitas infrastruktur tersebut dapat diakses dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Untuk riset-riset di masa mendatang dengan topik yang sejenis, dapat memperpanjang rentang waktu penelitian, membagi variabel DAK menjadi per bidang, serta menambah variabel kontrol yang digunakan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi lebih akurat terkait pengaruh DAK terhadap IPM dan pengaruh jangka panjang DAK terhadap IPM. Variabel *dummy* Jawa dan luar Jawa juga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk memperoleh informasi terkait perbedaan pembangunan manusia di daerah Jawa dan di luar Jawa. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan DAK guna memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang pengaruh DAK terhadap pembangunan manusia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari riset yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberi bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta bahan pemikiran baik bagi Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan penyaluran DAK dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Di samping itu, riset ini juga diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.

Keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu variabel DAK dalam penelitian ini merupakan total DAK secara keseluruhan yang diterima oleh setiap pemerintah tingkat kabupaten/kota. DAK tersebut belum dibagi berdasarkan bidang maupun berdasarkan jenis (DAK Fisik dan DAK Nonfisik). Selain itu, penggunaan variabel belanja modal merupakan total secara keseluruhan yang direalisasikan oleh setiap pemerintah tingkat kabupaten/kota. Belanja modal tersebut belum dibagi berdasarkan jenis bagiannya (belanja publik dan belanja aparatur).

REFERENSI

Appiah, M., Amoasi, R., & Frowne, D. I. (2019). Human development and its effects on economic growth and development. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 101-109.

Ardhani, P. (2011). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Arisman. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *7*(1), 113-122.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Analisis perspektif, permasalahan dan dampak dana alokasi khusus (DAK)*.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks pembangunan manusia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bahl, R. (1999). *Implementation rules for fiscal decentralization*.

Fauzan, M. (2016). Peluang titik berat otonomi pada daerah provinsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 173-189.

Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics fourth edition*. New York: McGraw Hill.

Kementerian Dalam Negeri. (2002). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah*.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020*

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, *6*(2), 103-213.

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, *1*(1), 1-15.

Nilawati, E. (2019). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur*, *9*(1), 41-60.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.

Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. *IFIR Working Paper*.

Pramartha, I. A., & Dwirandra, A. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2458-2482.

Purba, S. P. (2016). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Republik Indonesia. (2004a). *32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2014b). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.*

Republik Indonesia. (2015). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.*

Republik Indonesia. (2016). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.*

Republik Indonesia. (2017). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.*

Republik Indonesia. (2018). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.*

Republik Indonesia. (2019). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.*

Riviando, A., Henri, A., & Halmawati. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 1-17.

Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *5*(1), 77-92.

Siswadi, Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal. *Assets*, *5*(2), 281-298.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer, dana desa, dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *4*(3), 285-305.

United Nations Development Programme. (1990). *Human development report 1990*. New York: Oxford University Press.

Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2017). Kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, *6*(2), 16-31.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 44-51.

Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *4*(1), 21-28.

Yaqin, U. A., & Titiek, H. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, *1*(2), 123-136.

Indonesian Treasury Review
Vol.7, No.3, (2022), Hal 255-270

LAMPIRAN

Diagram Jalur Pengaruh DAK terhadap IPM

Sumber: Diolah penulis